

DARI ERA KARTINI, MENUJU ERA INDONESIA BARU BERSAMA POLISI WANITA



Oleh Dr Sulistyowati Irianto

INSPIRASI KARTINI

Seandainya Kartini masih hidup sekarang, perempuan cerdas, berpikir kritis dan "liar" untuk jamanjannya, tetapi tetap santun sebagai seorang perempuan Jawa itu, akan melontarkan berbagai pertanyaan. Ada begitu banyak pertanyaan, permasalahan dan kegelisahan yang mungkin dia kemukakan. Ternyata setelah dua abad berlalu, persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa ini, hampir sama. Bahkan setelah merenguk kemerdekaan 62 tahun, masih banyak warga bangsa yang hidup dalam kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. Perempuan masih banyak yang tidak punya akses kepada keadilan hukum dan sosial, sehingga perempuan perlu menyuarakan program *affirmative action* dalam bidang politik. Masih ada perempuan (dan laki-laki miskin) yang buta huruf, dan tidak punya akses kepada pendidikan dan kesehatan yang layak (Akses pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan

menjadi sangat krusial karena Kartini sendiri meninggal ketika melahirkan, dan angka kematian ibu melahirkan pada saat ini masih tinggi, yaitu dalam 30 menit seorang Ibu Indonesia mati karena kehamilan). Ternyata persoalan yang dihadapi Kartini pada jamanjannya, masih tetap aktual pada masa kini. Ironisnya, semua persoalan itu hidup berdampingan dengan modernism, konsumerisme, dan globalisasi pada masa sekarang.

Barangkali ia juga akan mengajukan pertanyaan yang visioner, dapatkah dibayangkan jika 220 juta rakyat Indonesia semuanya pandai, sehat, dan berprestasi dalam berbagai bidang. Mungkin kita sudah bangkit, menyamai kemajuan bangsa Cina, India, yang akan menjadi kekuatan *superpower* baru di dunia. Kita akan menjadi kekuatan besar dan bangsa yang bermartabat dalam pergaulan antar bangsa, setidaknya di Asia.

Oleh karena itu sangat relevan untuk menempatkan sosok Kartini dalam konteks sejarah gerakan masyarakat madani, khususnya gerakan perempuan di Indonesia. Kartini telah memulai sejarah gerakan perempuan tersebut, yang diteruskan oleh generasi berikutnya dalam berbagai fase sejarah perjalanan bangsa bersama dinamika sosial dan politiknya, sampai hari ini.

Selanjutnya tulisan ini akan berbicara tentang gerakan perempuan Indonesia dalam perspektif sejarah, dan kemudian akan menghubungkannya dengan isu keberadaan polisi wanita di tubuh kepolisian Re-

publik Indonesia.

GERAKAN PEREMPUAN

Kita baru tahu dari sejarah yang "tersembunyi" bahwa persamaan di muka hukum bagi perempuan dan laki-laki dinegeri ini, dan hak pilih bagi perempuan Indonesia, adalah hak yang tidak didapat dengan gratis, tetapi hak yang diperjuangkan oleh kaum perempuan sendiri. Kedua hal inilah yang penting dicatat dalam memperingati Hari Ibu sesudah 61 tahun merdeka. Pada tahun 1915 perempuan Indonesia, sudah berani menyampaikan mosi kepada Gubernur Jenderal



Belanda agar pria dan wanita diperlakukan sama di muka hukum. Pada tahun 1941 kembali perempuan Indonesia mengirimkan mosi kepada pemerintah Hindia Belanda agar perempuan diberi hak pilih untuk menjadi anggota Dewan kota. Tuntutan ini juga disampaikan kepada Dewan Rakyat, Fraksi Nasional dan Gubernur Jendral.

Sayangnya catatan penting ini kurang ditemukan dalam pelajaran sejarah yang diajarkan di sekolah. Padahal, dengan tidak menyertakan perempuan dalam penulisan sejarah, tidak akan didapat gambaran yang utuh mengenai sejarah suatu bangsa. Apa yang kita jalani hari ini adalah sejarah yang sedang ditulis dan sedang terjadi. Karenanya, kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita alami sekarang, bukanlah soal kekinian saja, tetapi merupakan kelanjutan dari apa yang pernah berlangsung dalam sejarah.

Kesinambungan sejarah gerakan perempuan masa kini dapat ditemukan, antara lain, dalam upaya reformasi hukum yang melahirkan kuota politik 30 persen, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga, dan UU Kewarganegaraan. Perempuan terus terlibat dalam proses legislasi seperti upaya *engendering* draft UU Anti Trafiking, penolakan terhadap instrumen hukum dan kebijakan negara yang bernuansa ketidakadilan bagi perempuan dalam ranah keluarga dan masyarakat. Perempuan juga mendorong diratifikasinya berbagai instrumen hukum internasional yang menjamin keadilan dan kesetaraan bagi setiap orang.

KEKUATAN PEREMPUAN

Ciri khas dari perlawanan perempuan adalah tindakan tanpa kekerasan, jauh dari anarkhi, dan dilakukan dalam bentuk pemberdayaan diri sendiri. Dalam hal ini perempuan memiliki modal sosial yang sangat kuat, yaitu menghimpun diri dalam organisasi. Mosi menuntut persamaan hak dimuka hukum dilakukan melalui organisasi Poetri Mahardika. Mosi menuntut hak pilih dilakukan melalui Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI), sebuah federasi yang terdiri dari banyak organisasi yang dideklarasikan kelahirannya

pada Kongres Perempuan pertama tahun 1928.

Agenda perjuangan perempuan melalui organisasi masa kini bukanlah hal baru. Suara perempuan menentang praktek poligami sudah menjadi agenda gerakan perempuan sejak Kongres 1928, dan selalu kandas baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, dan ternyata kembali aktual saat ini. Peningkatan nasib buruh perempuan yang dilatarbelakangi oleh nasib buruk perempuan dalam industri batik sudah menjadi agenda gerakan perempuan tahun 1935. Demikian pula, agenda pemberantasan perdagangan anak perempuan (untuk menebus hutang orang tua kepada pedagang "*minding*"), sekarang menemukan bentuk baru dalam upaya memasukkan perspektif perempuan dalam draft UU Anti Trafiking.

Pada tahun 1941 organisasi perempuan menyatakan berasaskan kebangsaan dan menjadi bagian dari pergerakan kebangsaan Indo-



FOTO: EVA HARTINI

nesia, dan membantu Gabungan Aksi Kemerdekaan Indonesia (GAKI) yang bertujuan 'Indonesia berparlemen'. Karenanya tidak mengherankan bila gerakan perempuan masa kini sangat gencar menyuarakan penolakan terhadap draft UU Pornografi dan Pornoaksi, yang berpotensi menyimpangi kesepakatan bersama mempertahankan kebhinekaan dalam berbangsa.

SUARA PEREMPUAN DI RANAH AKADEMIK

Kajian terhadap isu-isu perempuan dan feminisme dalam ranah akademik di Indonesia sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1980-an, dengan munculnya perkuliahan mengenai isu perempuan dalam berbagai disiplin ilmu di universitas, seperti psikologi, sosiologi, dan hukum. Tokoh-tokoh ilmuwan perempuan di universitas tidak hanya menciptakan mata kuliah baru, tetapi juga mendirikan berbagai lembaga studi dan mengembangkan berbagai kajian mengenai permasalahan yang dihadapi perempuan. Masa ini menandai babak baru sejarah masuk dan berkembangnya studi perempuan di dunia akademik.

BELAJAR DARI PENGALAMAN PEREMPUAN

Perjuangan gerakan perempuan hendaknya dipahami bukan sebagai gerakan melawan laki-laki, tetapi perjuangan bersama melawan kekuasaan yang tidak adil demi semua orang. Ketika bangsa ini masih menyimpan persoalan besar, banyak kelompok lebih memilih pertikaian, kekerasan, dan menggunakan atribut primordialisme dalam memperjuangkan keadilan dan ketiadaan akses kepada sumberdaya. Sementara para perempuan memperjuangkan kepentingannya dengan memberdayakan diri sendiri, menggalang *sisterhood*, melintasi batas-batas primordialisme, dan menempuh cara-cara damai. Perempuan Indonesia memiliki caranya sendiri dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Sebuah pengalaman yang sering terkubur dalam sejarah arus umum, bahkan membutuhkan perjuangan tersen-

diri untuk sekedar didengar dan diperhatikan oleh para pengambil keputusan di negeri ini.

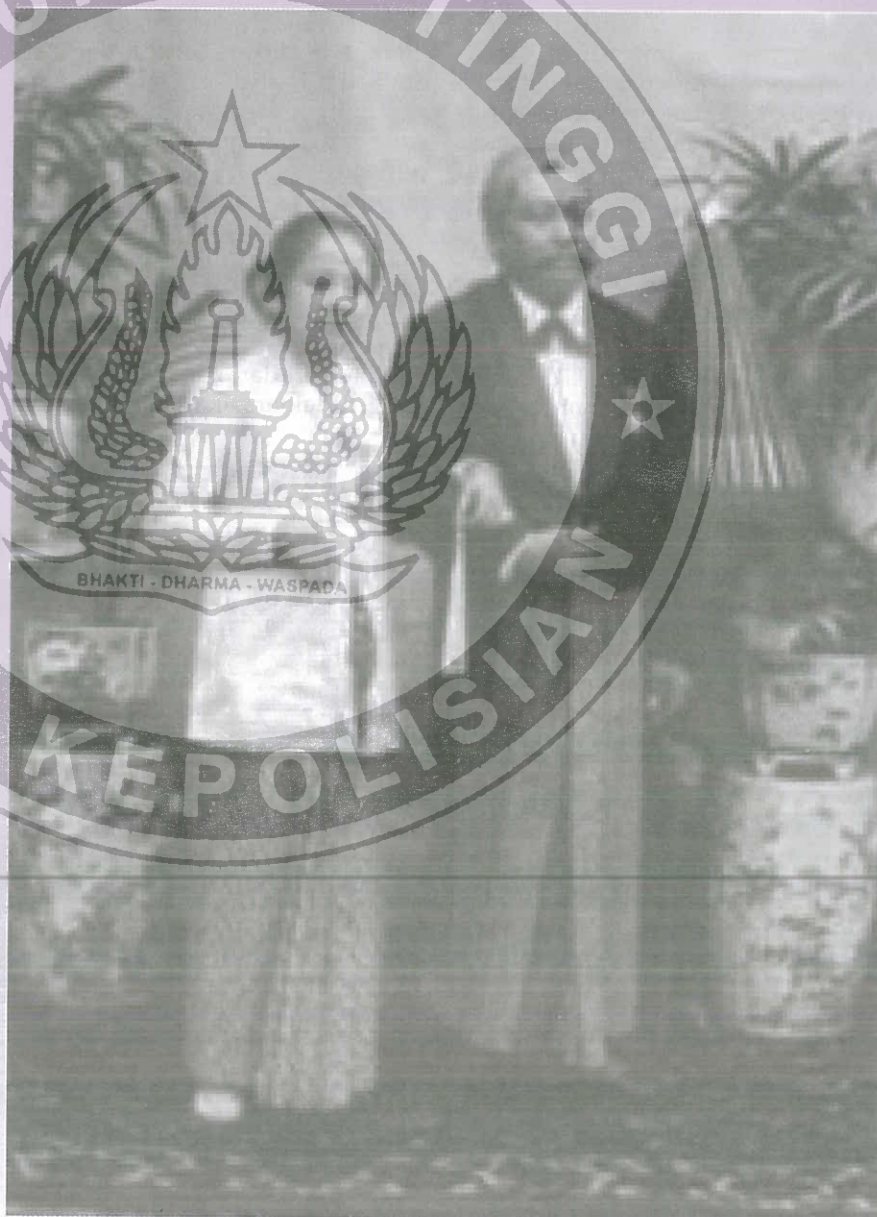
PEREMPUAN DALAM LEMBAGA KEPOLISIAN

Tulisan ini selanjutnya akan menyoroti keberadaan perempuan dalam lembaga penegakan (dan layanan) hukum. Bagaimanakah akses perempuan kepada kesempatan yang sama dalam berkarier dalam lembaga kepolisian? Kendala apa yang dihadapi perempuan untuk dapat mendarmabaktikan dirinya sama seperti mitra laki-laki, dalam melayani masyarakat pencari kea-

dilan?

"Polisi wanita (Polwan) lebih jujur, tegas dan disiplin; masyarakat pada umumnya lebih segan dan simpati kepada polwan; mereka dapat menangani perkara khusus yang berkaitan dengan pelaku atau korban perempuan; secara keseluruhan polwan dianggap dapat memperbaiki citra Polri yang negatif"

Pernyataan tersebut adalah temuan hasil penelitian (Fitriana, et.al, 2006). Ketika rasio antara kebutuhan warga dan ketersediaan polisi di Indonesia masih jauh dari cu-





kup, mengapa polwan tidak diperbanyak saja? Apakah animo masyarakat untuk menjadi polwan kurang? Apa alasan institusi kepolisian untuk tidak merekrut banyak polwan?

Dalam beberapa penelitian yang lain juga terungkap bahwa banyak warga masyarakat menginginkan lebih banyak kehadiran polwan karena berbagai alasan, diantaranya, polwan "tidak mudah disogok". Kebutuhan akan polwan di masyarakat sangatlah nyata karena, pertama, semakin banyaknya laporan kasus kekerasan terhadap perempuan, yaitu 34.665 (Komnas Perempuan, 2006). Kedua, kebutuhan untuk mengaktualisasi potensi polwan dalam menjalankan tugas operasional kepolisian, sama seperti polisi laki-laki (polki). Ketiga, memberi peluang yang sama kepada polwan dan polki untuk memberikan sumbangsuhnya yang maksimal kepada bangsa, sebagaimana disyaratkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di negeri ini.

KEBUTUHAN MASYARAKAT

Menurut standar PBB, rasio ideal antara jumlah polisi dan masyarakat yang dilayani adalah 1:400. Di Indonesia terdapat beberapa versi angka, tetapi yang banyak diacu adalah 1:750. Angka ini bukan hanya tidak memenuhi standar PBB, tetapi juga masih ketinggalan bila dibandingkan dengan beberapa negara Asia lain seperti Brunei, Hongkong, Singapura, Malaysia.

Jumlah Polisi di tahun 2007 ini adalah 360.381 orang, dengan prosentase polwan yang sangat kecil yaitu 11.706 orang atau 3,25%. Prosentase polwan dari tahun ke tahun memang cuma sekitar tiga persen dari seluruh jumlah polisi. Sama seperti angka di tahun 2004 misalnya, dimana jumlah Polisi sebanyak 280.977, dan jumlah polwan adalah 8.854 atau 3% (Mabes Polri, 2007).

Angka tersebut menunjukkan bahwa seorang polwan melayani 11.000 perempuan Indonesia yang jumlahnya sekitar 50% dari keseluruhan jumlah penduduk.

KEBERADAAN POLWAN

Dari keseluruhan polwan yang cuma sekitar 3% itupun, sebagian besarnya, yaitu 70% berpangkat Bintara (Mabes Polri, 2007). Apakah polwan tidak mampu berprestasi?

Dari *need assessment* yang dibuat oleh Federasi Bantuan Hukum APIK, terbukti bahwa animo perempuan untuk menjadi polwan sangat besar. Namun cita-cita perempuan yang berkeinginan menjadi polisi sering terkendala oleh adanya kuota. Misalnya pada setiap perekrutan polwan tingkat bintang, kuotanya hanya sekitar 500 orang, sedangkan untuk polki sekitar 16 ribuan calon per tahun (Fitriana, et.al, 2006). Bisa jadi dari ratusan perempuan yang berminat menjadi polwan di tiap daerah, yang diterima hanya beberapa orang. Kebijakan memberlakukan kuota tidak dilakukan tertulis, tetapi menjadi acuan yang efektif dalam perekrutan polisi. Umumnya kebijakan tersebut dilandasi oleh adanya stigma, stereotipe bahwa sebagai perempuan, polwan tidak mampu menjalankan tugas operasional kepolisian sebagaimana polki.

Tidak mengherankan jika setelah menjadi polisi pun, polwan diberi pekerjaan "penyangga" seperti logistik, administrasi dan kesekretariatan. Posisi dan jabatan yang berkaitan dengan tugas substansial kepolisian seperti intelijen dan reserse jarang diberikan kepada perempuan. Saat ini ketika memasuki masa kemerdekaan ke 62, hampir tidak ada polwan aktif yang berpangkat jenderal, dan hanya beberapa yang berpangkat Komisaris Besar (Kombes). Padahal pada masa lalu kita pernah memiliki jenderal polwan yang sangat kredibel di masyarakat seperti Ibu Rukmini dan Ibu Jean Mandagi.

Hanya sedikit polwan yang diberi kepercayaan menduduki jabatan strategis di seluruh Indonesia, yaitu 4 orang Kapolres, 5 orang Wakapolres, 12 orang Kasat, 57 Kapolsek dan 16 orang Wakapolsek (Bappenas, KPP, 2006). Ini tentu karena mitos tentang ketidakmampuan perempuan untuk menjalankan tugas ke-

polisian yang dianggap "heroik". Padahal, dalam suatu *need*

assessment, polwan di Aceh mengatakan: "Kami siap bertugas mengamankan Pilkada, tetapi malah kami disuruh pulang, karena kami dianggap tak mampu".

Kurangnya tenaga polwan paling dirasakan oleh Ruang Pelayanan Khusus (bagi perempuan korban kekerasan) yang sudah susah payah dibangun di seluruh negeri, tetapi tidak memiliki cukup sumberdaya.

Ternyata hambatan bagi perempuan untuk masuk dan berkarir dalam bidang kepolisian, bukanlah persoalan profesionalitas dan kemampuan, tetapi lebih didasarkan pada persoalan budaya dan "politik", yang dijadikan sebagai pembenar bagi pembedaan perlakuan terhadap polwan.

MENUJU "INDONESIA BARU"

Ada "serpihan" sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia yang "tersembunyi", yaitu tentang keterlibatan perempuan melalui berbagai organisasi wanita dan juga keterlibatan langsung di medan perang pada masa pendudukan Jepang maupun Belanda. Alangkah baiknya bila kita belajar dari sejarah, bagaimana gerakan perempuan selalu terlibat aktif dalam gerakan kebangsaan. Sudahkah kita bertanya, setelah 62 tahun merdeka, apakah kita masih belum bersedia mengakui bahwa perempuan juga mampu mengemban tugas penegakan hukum, keamanan, dan pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam UU no 2/2002 tentang Kepolisian Negara? Citra polisi yang sedang berusaha ditingkatkan di negeri ini, akan sangat ditentukan oleh kesediaan institusi kepolisian untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat beserta aspirasinya.

*** Penulis adalah Staf Pengajar pada Fakultas Hukum UI, FISIP UI, PTIK dan Kepala Pusat Kajian Wanita dan Gender UI

POLRI IMBANGI SINETRON-SINETRON TIDAK 'BERGIZI'

MINIMNYA tayangan sinetron berkualitas di televisi tak hanya memprihatinkan kalangan pendidik, dan orangtua yang memiliki anak-anak kecil. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi pelayan masyarakat, juga ikut terpanggil dalam upaya memperbaiki kondisi perfilman yang dinilai berdampak buruk bagi moralitas bangsa. Harus ada penyeimbang alternatif untuk sinetron-sinetron yang tidak mendidik, kata Irjen Pol Drs H Sisno Adiwino, MM, Kapolda Sulawesi Selatan.

PERNYATAAN tersebut disampaikan Kapolda Sulawesi Selatan, dalam acara syukuran *launching* sinetron bertajuk *Sebuah Kejujuran*, di Aries Biru Villa, Cianjur-Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/5). Sinetron produksi bersama Mabes Polri dengan rumah produksi Tridaya Film ini sudah diproduksi 13 episode dan tayang di stasiun Trans 7 mulai Senin, 5 Mei 2008 setiap pukul 09.00WIB.

Menurut Irjen Sisno Adiwino, gagasan dan ide cerita yang diangkat menjadi sinetron *Sebuah Kejujuran* muncul di saat dirinya umroh beberapa tahun lalu. Di kota suci Mekah itulah, dirinya bertemu dengan koleganya berbisnis properti, Drs H Edhi Niam Wakhidi. Dalam perbincangan akrab keduanya itulah, muncul kesamaan rasa terhadap sinetron di televisi. Prihatin.

"Saya dan Pak Edhi akhirnya menuangkan gagasan bersama untuk sebuah cerita sinetron, yang dapat memberikan alternatif. Saya ketika itu masih di Kepala Divisi Humas Mabes Polri dan berkeinginan ada juga sinetron atau film tentang polisi. Ini sekaligus sebagai panggilan jiwa dan kepedulian sebagai anggota masyarakat yang dalam kehidupan bernegara, tidak dapat dilepaskan dari system, hukuman aturan lainnya. Bahasa idealnya, kami menginginkan hukum sebagai panglima dalam bernegara," kata-

nya.

Gagasan dan ide tersebut tidak dapat langsung terlaksana. Banyak kendala dihadapi termasuk dalam hal sponsorship dan waktu. "Karena banyak pesan moral yang diangkat dalam cerita yang akan dibuat, sehingga sulit mencari sponsor. Alhamdulillah, semua itu dapat dilewati. Kini masyarakat penonton terutama anggota keluarga Polri bisa menikmati sinetron yang dapat menggugah rasa perjuangan dan melihat secara jernih hitam-putih wajah Polri dan suka-du-



Dari kiri ke kanan Iskandar (Deputy III Menpora), Irjen Pol Drs H Sisno Adiwino, MM (Kapolda Sulawesi Selatan), Drs H Edhi Niam Wakhidi (produser).

kanya menjadi abdi Negara, sebagai polisi," lanjut Irjen Sisno.

Diakui oleh Irjen Sisno, ada pameo di kalangan masyarakat yang mengatakan untuk bisa masuk menjadi anggota Polri harus membayar dan menjadi masuk Bintara harus membayar 50-an juta rupiah. Atau kejadian lalulintas yang dapat diselesaikan dengan 'damai'. "Polri tidak menutup mata dengan semua itu, tetapi secara institusi Polri hal seperti itu tidak ada dan tidak dibenarkan. Jika ada seperti itu terjadi pasti dilakukan oleh oknum," katanya.

Dengan hadirnya sinetron yang mengambil syuting di Akademi Kepolisian Cirebon, Semarang, dan Yogyakarta ini, diharapkan pula masyarakat akan mendapatkan jawaban yang utuh tentang Polri dan anggota polisi.

Dalam pengamatan Sisno, televisi baik dalam pemberitaannya, atau program film dan sinetron memang sudah memberikan informasi tentang polisi namun masih ada sekat-sekat yang mengganggu, terutama yang mengangkat beberapa kasus polisi. Dalam kondisi seperti ini, wajah polisi menjadi tidak jelas dan tuntas. Pencitraan polisi yang baik melalui sinetron harus dilakukan, termasuk bagaimana pola kerja, suka-duka para anggota Bhayangkara, atau kebijakan Polri seraya tidak melupakan sisi-sisi buruk oknum di lapangan. Semua akan menjadi bagian cerita dalam sinetron.

"Jadi, memang perlu dibuat sebuah media pandang-dengar seperti film atau sinetron yang memberikan informasi lengkap tentang institusi kepolisian di Negara ini. Tentu saja, kemasan sinetron ini dikemas menghibur dan berisi pesan pendidikan moral, dan nilai-nilai kebudayaan Indonesia," ujar Irjen Sisno yang kagum pada keberhasilan beberapa film yang mengangkat kisah polisi seperti *The Serpico*, *Chips*, *LAPD Blue*, dan *Dirty Harry*.

"Sebuah Kejujuran ini memberikan sesuatu tontonan yang berbeda. Perbedaan yang dimaksud adalah keseriusan dalam menjawab keinginan masyarakat yang sangat



Irjen Pol Drs R Abubakar Nataprawira (Kepala Divisi Humas Mabes Polri)

merindukan tayangan-tayangan yang informatif dan edukatif," jelas Irjen Pol Sisno Adiwino.

Sinetron *Sebuah Kejujuran*, menurut Drs H Edhi Niam Wakhidi selaku produser, berkisah tentang kehidupan anggota Bhayangkara dari berbagai sisi penugasan dan kehidupan pribadi sebagai masyarakat sipil.

"Kami mencoba mengetengahkan kehidupan nyata masyarakat Indonesia yang majemuk, merdeka, berahlak, realistik, berbudaya dan mempunyai jati diri," kata Edhi Niam Wakhidi, yang mempercayakan sutradara DRP Iskandar untuk menggarap 13 episode sinetron ini. "Kami akan terus mengevaluasi hasil sinetron yang sarat nilai-nilai idealisme ini, agar juga dapat dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas.

Beberapa artis digayet untuk memerankan tokoh diantaranya Adam Alatas, Sarah Astriani, Eddy Elang, Oyin Aisyah, Diana Yusuf, Tino Martiano, Susan Mabes, dan beberapa anggota Bhayangkara. Selain menyajikan drama percintaan yang tidak *cengeng*, sinetron *Sebuah Kejujuran* mengadopsi dokumentasi beberapa event kegiatan Polri seperti upacara pelantikan anggota Bhayangkara dan lainnya.

Saat launching sinetron, sejumlah pejabat Mabes Polri, pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga turut hadir diantara para artis pemeran, serta sejumlah undangan dan wartawan. Diantara para pejabat Polri yang hadir adalah Irjen Pol Drs R Abubakar Nataprawira, SH (Kepala Divisi Humas Mabes Polri), Brigjen Pol Drs H Anton Baharul Alam, Kombes Pol Drs Bambang Kuncoko, Kombes Pol Drs Erlangga Lubis, Kombes Pol Drs Runadi, AKBP Drs Firman Santyabudi, MSi, dan AKBP Drs Hari Sudwijanto, MSi.

Dalam sambutannya, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol R Abubakar Nataprawira SH menyambut baik atas produksi dan penayangan sinetron yang mengangkat cerita tentang kepolisian Republik Indonesia.

"Tahun 2008 ini tantangan Polri sangat luas, karena menghadapi berbagai kejahatan baik yang konvensional sampai yang canggih. Tahun 2008 bukan hanya menjadi tahun kunjungan wisata tapi juga peningkatan dalam politik. Pelaksanaan Pilkada, pemilihan gubernur, bupati menjadi perhatian Polri. Untuk itu perlu didorong upaya ke arah peningkatan citra polisi. Sinetron *Sebuah Kejujuran* merupakan salah satu upaya pencitraan polisi yang harus didukung," katanya.

Tentang perlu hadirnya sinetron yang dapat menggugah kalangan remaja dan pemuda untuk mencintai semangat kepahlawanan, moralitas dan kebudayaan nasional juga diungkapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault yang diwakili Deputi III Mendoro, Sudrajat.

"Sifat inferior yang destruktif, tidak jujur, menelikung, sangat merusak. Kejujuran yang identik dengan kejernihan hati akan membawa keutuhan bangsa. Sinetron seperti *Sebuah Kejujuran* inilah yang diharapkan menggugah pemuda untuk memuliakan kejujuran," kata Sudrajat, menyampaikan pesan Adhyaksa Dault.

[teguh imam s]

SINETRON 'SEBUAH KEJUJURAN' UNGKAP REFORMASI DI TUBUH POLRI

SEBUAH karya seni yang berkualitas tentu diminati para pemirsa, yang akhirnya akan mendatangkan keuntungan materi maupun nonmateri yakni moral bagi para pembuatnya. Maksud baik Mabes Polri untuk membuat sinetron *Sebuah Kejujuran* tentu bisa terwujud jika mendapat tanggapan yang seimbang oleh semua pihak, seperti insan film, para pengelola stasiun televisi, serta dukungan sponsor dan abdi masyarakat.

Hal yang juga sangat vital bagi sinetron agar diterima baik oleh seluruh kalangan adalah dengan tetap mengedepankan rambu-rambu industry; yakni kualitas produksi, kekuatan naskah dan skenario, para pemain, dan tentu saja kepiawaian sutradara. *Sebuah Kejujuran* merupakan sinetron berlatar idealisme yang membawa beban cukup berat; pesan moral, sekaligus media pencitraan sebuah institusi yang memikul tanggungjawab cukup besar seperti Polri.

Polri yang telah melakukan reformasi ke dalam, semakin terbuka dan menerima kritikan. Namun, Polri juga menyadari haknya untuk melakukan pembelaan diri, di saat muncul anggapan dan penilaian buruk yang kerap tidak terjawab secara tuntas di masyarakat. Dalam sinetron berbiaya Rp4 Miliar ini Polri tak hanya menyajikan sisi baik dan perbaikan citra dirinya, namun berani dan jujur mengungkap 'kebobrokan' oknum yang ada.

Kisah dalam episode pertama menghadirkan tokoh-tokoh sentral yakni Te-

guh (diperankan Adam Alatas), Ratih (diperankan Sarah Astriani), dan Wulan (Oyin Aisyah), dan beberapa taruna Akpol.

Diawali dengan suasana dalam sebuah keluarga. Seorang pemuda bernama Teguh merupakan anak pertama dari tiga bersaudara hasil pernikahan Ridho (almarhum) seorang mantan anggota Polri dengan Anisa, seorang ibu rumah tangga. Kedua adiknya, Dewi dan Diah masih duduk di SMU. Selain mahir bermain bola, Teguh menguasai permainan Barongsai.

Setelah meraih gelar sarjana, tekad Teguh mendaftarkan diri ke Akademi Kepolisian (AKPOL) mendapat beberapa rintangan, terutama dari pamannya yang menghen-

daki agar Teguh segera menikah dengan Ratih. Sebagai pemain sepakbola yang andal, bakat Teguh juga dipantau oleh petinggi Team Nasional, bahkan diharapkan segera bergabung dalam Pelatnas.

Sudah lama Wulan tertarik pada Teguh. Gadis cantik berdarah Tionghoa, putri bungsu pasangan Ong Swie An dan Misyie, pengusaha batik ternama di daerahnya. Selain sangat menggemari kesenian tradisional Wulan juga berbakat mendesain batik tradisional. Demi kecintaannya terhadap dunia batik tulis ini, dalam setiap kuliah, waktunya dihabiskan untuk mendesain dan menggali kembali jenis-jenis batik tulis yang hampir punah.

Kedekatan antara Teguh dan Wulan diawali persahabatan dengan Ongkowi-joyo kakaknya. Keduanya pasangan tangguh dalam bermain Barongsay, begitu pula dalam kesebelasan sepakbola. Kedekatan mereka seperti ada pertalian saudara. Di mata Teguh, Wulan termasuk gadis ideal. Maka tidak heran bila benih-benih cintanya mulai bersemi. Namun sayang, oleh pamannya, Haji Soleh, Teguh telah dijodohkan dengan Ratih, putri semata wayang Haji Ridwan, pengusaha hasil laut yang sukses.

Setelah menamatkan kuliah program D3, Ratih gadis berperawakan tinggi semampai, berambut panjang yang berparas anggun berusia 20 tahun ini mengabdikan diri menjadi guru TK pada Yayasan Asih Asuh.

Hubungan Teguh dengan Ratih biasa saja, ha-



Adam Alatas, pemeran Teguh

nya sesekali mereka terlihat jalan berdua. Teguh belum berminat berumahtangga karena masih ingin memperjuangkan cita-citanya, menjadi Taruna Akpol. Sementara Ratih si kembang desa, saat ini seang didekati oleh Adang, putra Pak Jaya ketua Yayasan Asah Asih.

Namun Teguh memilih ketetapan untuk menjadi Taruna Akpol. Sebuah pilihan yang berat, namun juga tidak kalah banyak rintangan dan cobaan untuk melaksanakannya. Benar saja, belum apa-apa Teguh sudah dihadapkan dengan isu percaloan saat penerimaan anggota baru Polri. Banyak pihak beranggapan bahwa tanpa dukungan biaya yang besar sulit sekali seseorang bisa diterima masuk sekolah calon bintara apalagi Akpol.

Rupanya isu percaloan tersebut, tercium juga oleh jajaran Polres setempat. Karena isu itu sangat mencoreng nama baik kepolisian serta akan memakan banyak korban, maka dengan sigap Kapolres AKBP Heri langsung menurunkan anggotanya mencari kebenaran isu tersebut. Dipimpin oleh Ajun Komisaris Polisi Parjo, sejumlah anggota Reskrim menyelidiki kasus percaloan ini. Dalam waktu singkat berhasil meringkus para calo yang diantaranya ada oknum anggota polisi dan setelah itu diproses secara hukum yang berlaku.

Karena keyakinan dan kemampuannya serta kemauan yang keras, akhirnya Teguh diterima menjadi Taruna Akpol. Begitu pula Rochim, putra Pak Rochman adik Haji Ridwan, berhasil diterima di Secaba (Sekolah Calon Bintara) tanpa harus mengeluarkan uang suap. Para calon anggota Bhayangkara ini mengikrarkan diri untuk menjadi penegak hukum dengan jalan yang benar. [teguh imam s]

SARAH ASTRIANI: TANTANGANNYA? JALAN-JALAN..



WAJAHNYA mengingatkan pada sosok artis pemeran *Buruan Cium Gue*. Gadis bernama asli Sarah Astriani ini belum banyak tampil di jagad sinetron. Pengalamannya berakting untuk pertamakalinya dalam FTV *Arti Cinta Dalam Secangkir Kopi*, produksi Frame Ritz. Namun, ia mengaku mendapatkan ilmu yang berguna tentang instusi kepolisian Republik Indonesia. Ilmu yang diterimanya itu, terkait perannya sebagai Ratih di sinetron *Sebuah Kejujuran* produksi Tridaya Film berkerjasama dengan Mabes Polri.

"Eh, ternyata polisi itu tegas, gagah dan baik lho," kata Sarah Astriani yang ditemui di sela peluncuran sinetron *Sebuah Kejujuran* di kawasan Cisarua-Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/5).

Sebelum bermain dalam sinetron tentang sosok polisi dan kehidupannya itu, Sarah

sempat memiliki penilaian negatif terhadap polisi. "Aku pernah sebal sama polisi. Karena aku sering ditilang," kata artis yang mengawali karir sebagai model iklan.

Beberapa kali, kata Sarah, dirinya ditilang saat berkendara mobil. Biasanya, dia terpaksa ditilang karena memang melakukan pelanggaran lalu lintas. "Habisnya memang aku yang bandel, suka langgar aturan. Jadi sering kena tilang. Tapi, suatu kali temanku yang menyetirkan mobil, eh yang kena getahnya juga aku," ujar artis kelahiran Lampung 7 September 1988.

Tentang perannya di sinetron *Sebuah Kejujuran*, Sarah mengatakan sangat menantang terutama karena, dia harus bisa berbagi waktu dengan kuliahnya di salah satu akademi manajemen di Jakarta. "Kan syutingnya panjang dan harus dilakukan di beberapa kota seperti Cirebon, Semarang dan Yogyakarta. Jadi, tantangan

buatku karena harus jalan-jalan yang bukan untuk santai tapi kerja," ujarnya seraya tersenyum.

Kendati harus melakukan perjalanan pulang-pergi antara Jakarta dengan kota-kota lain lokasi syuting, gadis pemilik sebaris kumis lembut di atas bibirnya ini, dapat mengelola waktu. "Syukur, sampai sekarang belum ada benturan jadwal kuliahku dengan syuting. Semua masih bisa dijalankan," katanya.

Satu hal, Sarah merasa sangat beruntung soal keberadaan bulu-bulu halus yang tumbuh menyerupai kumis di atas bibirnya, dan juga di seluruh lengannya. "Biarkan saja begini, aku bersyukur dengan pemberian Tuhan yang seperti ini. Nggak perlu dicukur, lagi," ujar Sarah menjawab pertanyaan beberapa wartawan yang datang dan kebetulan semuanya dari jenis laki-laki.

[teguh imam s]

Bahwa, PERNIKAHAN ADALAH SEKOLAH

BERTAHUN-tahun yang lalu, saya berdoa kepada Tuhan untuk memberikan saya pasangan, "Engkau tidak memiliki pasangan karena engkau tidak memintanya", Tuhan menjawab.

Tidak hanya saya meminta kepada Tuhan,seraya menjelaskan kriteria pasangan yang saya inginkan. Saya menginginkan pasangan yang baik hati,lembut, mudah mengampuni, hangat, jujur, penuh dengan damai dan sukacita, murah hati, penuh pengertian, pintar, humoris, penuh perhatian. Saya bahkan memberikan kriteria pasangan tersebut secara fisik yang selama ini saya impikan.

Sejalan dengan berlalunya waktu,saya menambahkan daftar kriteria yang saya inginkan dalam pasangan saya. Suatu malam, dalam doa, Tuhan berkata dalam hati saya, "Hamba-Ku, Aku tidak dapat memberikan apa yang engkau inginkan."

Saya bertanya, "Mengapa Tuhan?" dan Ia! menjawab, "Karena Aku adalah Tuhan dan Aku adalah Adil. Aku adalah Kebenaran dan segala yang Aku lakukan adalah benar."

Aku bertanya lagi, "Tuhan, aku tidak mengerti mengapa aku tidak dapat memperoleh apa yang aku pinta dariMu?"

Jawab Tuhan, "Aku akan menjelaskan kepadamu. Adalah suatu ke-

tidakadilan dan ketidakbenaran bagiKu untuk memenuhi keinginanmu karena Aku tidak dapat membe-

mengampuni, tetapi engkau sendiri masih suka menyimpan dendam; seseorang yang sensitif, namun engkau sendiri tidak..."

Kemudian Ia berkata kepada saya, "Adalah lebih baik jika

Aku memberikan kepadamu seseorang yang Aku tahu dapat menumbuhkan segala kualitas yang engkau cari selama ini daripada membuat engkau membuang waktu mencari seseorang yang sudah mempunyai semua itu. Pasanganmu akan berasal dari tulangmu dan dagingmu, dan engkau akan melihat dirimu sendiri di dalam dirinya dan kalian berdua akan menjadi satu. Pernikahan adalah seperti sekolah, suatu pendidikan jangka panjang. Pernikahan adalah tempat dimana engkau dan pasanganmu akan saling menyesuaikan diri dan tidak hanya bertujuan untuk menyenangkan hati satu sama lain, tetapi untuk

menjadikan kalian manusia yang lebih baik, dan membuat suatu kerjasama yang solid. Aku tidak memberikan pasangan yang sempurna karena engkau tidak sempurna. Aku memberikanmu seseorang yang dapat bertumbuh bersamamu".

[jete]



rikan sesuatu yang bukan seperti engkau. Tidaklah adil bagiKu untuk memberikan seseorang yang penuh dengan cinta dan kasih kepadamu jika terkadang engkau masih kasar; atau memberikan seseorang yang pemurah tetapi engkau masih kejam; atau seseorang yang mudah